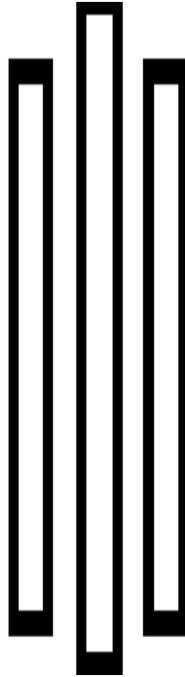




PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR

RENCANA KERJA (RENJA)
KECAMATAN UDANAWU
TAHUN 2024

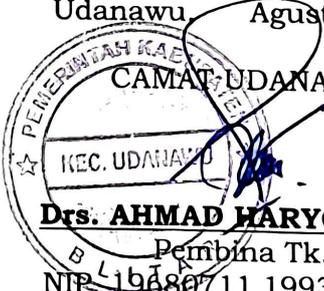


PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
KECAMATAN UDANAWU
JLN. RAYA KEDIRI NO. 802 TELP. 0342-551005

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Udanawu maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Oleh karenanya Kecamatan Udanawu diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa Kecamatan Udanawu dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **"menyentuh hati"** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **"dilayani"** menjadi **"melayani"**.

Udanawu, Agustus 2023
CAMAT UDANAWU,

Drs. AHMAD HARYONO, MM
Pembina Tk. I
NIP. 19680711 199303 1 006

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat merupakan fungsi yang harus diemban pemerintah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan, sebagai tolok ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Pintu masuk (*entry point*) bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik (*good local governance*) terfokus kualitas penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dan pembangunan daerah merupakan integral dari pembangunan nasional, sehingga perlu diselenggarakan secara seimbang dan serasi untuk menjamin keselarasan pembangunan. Untuk itu perlu disusun sebuah pedoman dan acuan dalam menetapkan kebijakan keuangan, strategi pembangunan, kebijakan umum program kerja perangkat daerah yang disertai dengan rencana kerja dalam rangka regulasi dan pendanaan bersifat indikatif. Oleh karenanya, diperlukan dokumen perencanaan yang meliputi Dokumen perencanaan jangka panjang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, jangka menengah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, perencanaan pembangunan tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan perencanaan Perangkat Daerah (PD) tahunan dituangkan dalam Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah.

Rencana kerja Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar dengan ruang lingkup tugas pokok dan fungsi utamanya ***meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta sebagai pelayan publik memerlukan kemampuan untuk berinteraksi dan menjalin hubungan yang harmonis, baik secara struktural (vertikal dan horisontal) maupun hubungan kepada masyarakat.*** Itu semua dapat diwujudkan melalui sebuah perencanaan yang profesional dengan memanfaatkan peluang serta menghindari ancaman yang ada, menggunakan kekuatan yang dimiliki dan mengeliminasi kelemahan yang muncul. Secara operasional perencanaan tersebut dijabarkan dalam penyusunan rencana kerja tahunan yang disusun setiap tahun.

Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar merupakan dokumen yang berisi informasi tentang tingkat atau target

kinerja berupa *output* atau *outcome* yang ingin diwujudkan pada tahun 2024. Rencana Kerja tersebut mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) PD dan Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) Kabupaten Blitar Tahun 2023. Rencana Kerja Tahun 2024 Kantor Kecamatan Udanawu nantinya lebih diarahkan pada optimalisasi dan sinergitas segala potensi yang dimiliki untuk menjawab segala tuntutan kebutuhan pembangunan dibidang pelayanan.

Posisi Kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar Kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi Kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se-Indonesia maksimal pada bulan oktober 2015. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Sehubungan dengan hal tersebut diatas Kecamatan Udanawu perlu melakukan tindakan melalui Rencana Kerja PD yang komperensif dan integratif. Rencana Kerja PD yang mampu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar kelurahan/desa, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah. Rencana

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih, dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- e. Permendagri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- f. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 09 Tahun 2011 tentang RPJMD Kabupaten Blitar 2011 - 2016.
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Blitar;
- i. Peraturan Bupati Blitar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Kedudukan , Susunan,Tata Organisasi dan Fungsi serta tata cara Kecamatan;
- j. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2019 Nomor 17/E);
- k. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

- l. Surat Edaran Bupati Blitar Nomor: 050/657/409.201.3/2021 Tanggal 4 Juni 2021 tentang Penyusunan Rancangan Renstra PD Tahun 2021-2026;
- m. Surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Blitar Nomor B/050/899/409.3.2/2022 tanggal 18 Juli 2022 tentang Penyusunan Dokumen Rancangan Akhir Renja Tahun 2023.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan renja PD adalah :

1. Tercapainya Keselarasan Dokumen Renja PD dengan RKPD 2024 Dan RPJMD
2. Terwujudnya dokumen perencanaan yang sesuai dengan kaidah perencanaan dan saling bersinergi antar dokumen perencanaan lainnya
3. Tercapainya Indikator Sasaran Renstra Pada Tahun 2024

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan yang digunakan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Kecamatan Udanawu adalah dengan menggunakan metode sesuai dengan Permen 86 Tahun 2018 yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja PD, proses penyusunan Renja PD, keterkaitan antara Renja PD dengan dokumen RKPD, Renstra PD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran PD.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja PD.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja PD, serta susunan garis besar isi.

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu Capaian Renstra PD

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun lalu (tahun n-1) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja PD sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan PD berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing PD, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD

Sub bab ini berisi uraian mengenai:

1. Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD;
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD;
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan MDGs (Millenium Development Goals);
4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD dan;

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
3. Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Menguraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, perguruan tinggi maupun dari PD kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada PD Provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi PD provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan). Deskripsi yang perlu disajikan dalam sub bab ini, antara lain :

1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan pemangku kepentingan tersebut diperoleh;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi PD.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan

dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi PD.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja PD

Sub bab ini berisi perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra PD.

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan. Misal : Pencapaian visi dan misi kepala daerah, Pencapaian MDGs, Pengentasan kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan potensi ekonomi daerah, Pengembangan daerah terisolir, dsb.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
 - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan (apa saja yang tersebar ke berbagai kawasan dan apa saja yang terfokus pada kawasan atau kelompok masyarakat tertentu).
 - Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang di rinci menurut sumber pendanaan.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD

TAHUN 2023

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun 2023

Kecamatan Udanawu pada tahun 2023 semester 1 telah melaksanakan 6 (enam) program yang tercantum dalam Penetapan Kinerja. Terhadap masing – masing program akan dianalisis sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan anggaran sebesar Rp 1.593.454.983,- dengan realisasi anggaran sebesar Rp 738.386.238,- dengan prosentase 46.34%

Indikator programnya adalah : Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, realisasi capaian indikator Program hanya mencapai 46.34% sedangkan target indikator program adalah 100%. Disini dapat dilihat bahwa target program tidak tercapai, hal ini dapat disebabkan karena:

- a. Capaian kinerja merupakan capaian selama Januari sd Juni 2023. Beberapa anggaran baru bisa dicairkan di tribulan 3 sesuai dengan pembagian anggaran kas.
- b. Perubahan standar harga satuan yang nilainya lebih tinggi dibandingkan dengan harga pasaran, sehingga terdapat sisa dalam penyerapan anggaran;

Kegiatan yang dilaksanakan adalah :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah realisasi penyerapan 0%;
 - b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dengan realisasi 50.36%;
 - c. Kegiatan Kepegawaian Perangkat Daerah dengan realisasi 6.48%;
 - d. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan realisasi 50.49%;
 - e. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi penyerapan 0%;
 - f. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan realisasi penyerapan 44.14%;
 - g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan realisasi penyerapan 9.89%.
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan anggaran Rp 22.154.300,- dengan realisasi anggaran Rp 10.753.400,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 48.54%.

Indikator programnya adalah : Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target Indikator 5 (Lima) Kegiatan. Adapun 5 (Lima) Kegiatan antara lain Kegiatan Pramusrenbang, Musrenbang, Monev,

Rapat Koordinasi, dan Sosialisasi. Sehingga dapat dilihat target Indikator Program dan realisasi kegiatan dapat tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa dengan realisasi Penyerapan 48.54%

3. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa anggaran Rp 25.320.300,- dengan realisasi anggaran Rp 0,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 0%

Indikator programnya adalah : Jumlah Peraturan Perundang-undangan desa yang dibuat dengan target indikator 20 (Dua Puluh) Dokumen. Realisasi capaian target indikator pada tahun 2023 mencapai 0 Dokumen. Sehingga dapat dikatakan target pada program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa belum tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa dengan realisasi Penyerapan 0%.

4. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik anggaran Rp 20.941.000,- dengan realisasi anggaran Rp 0,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 0%

Indikator programnya adalah : Presentase Desa dengan Predikat Nilai IKM baik dengan target indikator adalah 100%. Realisasi capaian target indikator pada tahun 2023 mencapai 0% dimana seluruh desa di Wilayah Kecamatan Udanawu Indeks Kepuasan Masyarakat berpredikat baik. Sehingga dapat dikatakan target pada program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik telah tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

a. Koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan dengan realisasi penyerapan 0%.

b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan dengan realisasi penyerapan 0%.

5. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum anggaran Rp 8.208.917,- dengan realisasi anggaran Rp 0,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 0%

Indikator programnya adalah : Jumlah Fasilitasi dan Koordinasi yang dilaksanakan dengan target indikator program adalah 5 (lima) kegiatan. Realisasi capaian target indikator pada tahun 2023 mencapai 5 (lima) kegiatan, adapun kegiatan yang dilaksanakan pada program koordinasi ketentraman dan ketertiban umum antara lain: PHBN, Penanganan Penyebaran Covid-19, Rapat Koordinasi, Monev Peraturan yang berlaku, dan Sosialisasi. Sehingga dapat dikatakan target pada Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum telah tercapai.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan realisasi penyerapan 0%;
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah 0%.

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum anggaran Rp 49.067.000,- dengan realisasi anggaran Rp 0,- sehingga prosentase penyerapan sebesar 0%

Indikator programnya adalah : Jumlah pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan, dengan target indikator 10 (sepuluh) kegiatan. Realisasi capaian target indikator pada tahun 2023 mencapai 10 (sepuluh) kegiatan yang dilaksanakan, antara lain: kegiatan PKK, Kabupaten Sehat, PPYGA, Pameran, Rapat Koordinasi, Monev, Dharma Wanita, dan Karang taruna. Sehingga dapat dikatakan target dalam program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum tidak tercapai. Hal ini dikarenakan tidak adanya pemangku jabatan yang difinitif sehingga seringkali pelaksanaan tidak sesuai jadwal yang telah ditetapkan.

Kegiatan yang dilaksanakan adalah:

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah dengan realisasi Penyerapan sebesar 0%.

Dari uraian diatas, dapat disimpulkan secara keseluruhan persentase penyerapan anggaran Kecamatan Udanawu Tahun 2023 semester 1 (Januari sd Juni 2023) sebesar 43.58%. Hal ini dikarenakan beberapa sub kegiatan akan dilaksanakan di semester 2 seperti peringatan PHBN, serta

menyesuaikan dengan jadwal anggaran kas yang sudah disepakati sebelumnya.

Adapun kendala-kendala yang ada di wilayah Kecamatan Udanawu:

1. Jauhnya pusat layanan yang mendasar bagi Masyarakat;
2. Kurangnya ketersediaan SDM yang mengakibatkan *overload* pekerjaan masing-masing staf.
3. Mekanisme dan pola kerja pada setiap unit kerja belum tertata dalam suatu sistem yang terpadu, efektif dan efisien;
4. Kurangnya Koordinasi yang baik antara ASN, yang berakibat kesalahpahaman diantara ASN.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas diperlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung pelayanan kepada masyarakat, diantaranya :

1. Pelayanan harus langsung menyentuh masyarakat;
2. Adanya koordinasi yang baik antara PPTK dengan Kasubag Penyusunan Program dan Kegiatan;
3. Harus adanya dukungan dari atasan baik Camat ataupun Sekretaris Camat sebagai Pejabat Pengelolaan Keuangan PD untuk mendukung pelayanan prima kepada masyarakat;
4. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi oleh kecamatan Udanawu dengan mengubah manajemen pemerintahan/*mindset* yang berorientasi ke kepentingan eksternal dengan disertai peningkatan pelayanan publik.

Tabel 2.1.1

RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN UDANAWU KAB. BLITAR
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
		KECAMATAN UDANAWU						2.019.146.500,00								2.686.014.500,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.019.146.500,00								2.686.014.500,00	
7.01		KECAMATAN						2.019.146.500,00								2.686.014.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					-	100 %							100 %	2.074.731.700,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					-	-	7.958.328,00			-	-	-	-	6.400.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah															
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				9 Dokumen	4.582.560,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.100.000,00	KECAMATAN UDANAWU	
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3 Laporan	3.375.768,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	KECAMATAN UDANAWU	
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					-	-	1.225.064.492,00			-	-	-	-	1.766.190.044,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				14 Orang/bulan	1.185.434.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.692.240.044,00	KECAMATAN UDANAWU	
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD															
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				85 Dokumen	38.235.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU	
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD															
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				18 Dokumen	903.540,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	KECAMATAN UDANAWU	
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD															
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	491.952,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000,00	KECAMATAN UDANAWU	
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					-	-	104.719.280,00			-	-	-	-	13.500.000,00	KECAMATAN UDANAWU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					14 Dokumen	719.280,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					1 Orang	104.000.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	125.725.463,00			-	-	-		76.500.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5 Paket	6.202.014,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.600.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					28 Paket	36.866.198,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.750.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10 Paket	5.637.468,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.450.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					6 Paket	6.755.127,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12500 Paket	6.226.656,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					48 Laporan	64.038.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	115.508.598,00			-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	62.544.726,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	52.963.872,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	142.150.627,00			-	-	-	-	85.141.656,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.387.500,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.114.207,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.941.656,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	131.648.920,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		74.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	170.738.636,00			-	-	-	-	62.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	78.847.906,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6.040.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85.850.730,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 %			-	20.059.432,00						100 %	66.828.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	16.200.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				14 Laporan	16.200.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	3.859.432,00			-	-	-	-	16.828.800,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				14 Laporan	3.859.432,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.828.800,00	KECAMATAN UDANAWU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	5 Kegiatan			-	29.222.480,00						5 Kegiatan	215.573.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	22.222.480,00			-	-	-	-	165.573.200,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				12 Lembaga Kemasyarakatan	7.449.432,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				42 Dokumen	14.773.048,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.573.200,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>				220 Keluarga	7.000.000,00	Kab. Bitar, Udawau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETERTIBAN UMUM	-	5 Kegiatan			-	6.727.349,00						5 Kegiatan	189.354.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketertibanan dan Ketertiban Umum	-	-			-	4.327.349,00			-	-	-	-	164.354.800,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				3 Laporan	3.277.349,00	Kab. Bitar, Udawau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.354.800,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				8 Laporan	1.050.000,00	Kab. Bitar, Udawau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	2.400.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				4 Laporan	2.400.000,00	Kab. Bitar, Udawau, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	10 Kegiatan			-	45.750.267,00						10 Kegiatan	73.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	45.750.267,00			-	-	-	-	73.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENYA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				8 Orang	43.500.267,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	20 Dokumen			-	25.521.548,00						20 Dokumen	66.526.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	25.521.548,00						-	66.526.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	14.689.604,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.526.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	3.389.144,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	5.842.800,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
J U M L A H								2.019.146.500,00						2.686.014.500,00		

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD

Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat. Standart Pelayanan Minimal (SPM) merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik.

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintah daerah dari sentralisasi ke desentralisasi harus disikapi Kecamatan Udanawu dengan mengubah manajemen pemerintahan yang berorientasi ke kepentingan *eksternal* dengan disertai peningkatan pelayanan publik. Dengan adanya orientasi baru dalam manajemen publik tersebut maka pemerintah khususnya Kecamatan Udanawu tidak saja dituntut akuntabilitasnya ke dalam tetapi justru ke luar (masyarakat). Melalui akuntabilitas publik, Kecamatan Udanawu akan dipantau dan dievaluasi kinerjanya oleh masyarakat. Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja akan lebih mudah jika Kecamatan Udanawu membuat indikator dan target-target yang disusun dalam Standart Pelayanan Minimal (SPM). SPM yang telah disusun akan menjadi pedoman bagi kedua belah pihak, Kecamatan maupun masyarakat tetapi perlu disayangkan bahwa Kecamatan Udanawu belum membuat SPM yang sesuai dengan peraturan pemerintah akan tetapi membuat Standart Operasional Prosedur (SOP) yang membuat alur pelayanan publik.

Sehingga tolak ukur indikator kinerja Kecamatan Udanawu hanya diukur dengan berapa besar anggaran yang tersedia dan direalisasikan, hal ini disebabkan karena PD yang terkait untuk menilai kinerja PD salah satu contohnya adalah Inspektorat dan Bagian Organisasi pada tahun 2023 akan memberikan hasil penilaian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKJIP-PD) sehingga PD Kecamatan sampai tahun 2023 akan mengetahui sejauh mana kinerja PD, mana yang harus ditingkatkan dan mana yang harus dibenahi atau yang harus dipertahankan.

Tabel 2.2.1
Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rata-rata Tingkat Capaian Kinerja Kegiatan pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tepat waktu dan sesuai dengan peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Jumlah dokumen Perencanaan dan Penganggaran Kinerja Perangkat Daerah yang disusun	9	9	9	9	10	9	9	9	9	9	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
4	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
5	Administrasi Perangkat Daerah		Persentase Laporan Administrasi Keuangan perangkat daerah yang tepat waktu dan akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Jumlah ASN yang disediakan Gaji dan Tunjangan	13	13	14	14	15	13	13	14	14		
7	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Jumlah Laporan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	80	80	85	85	87	80	80	85	85		
8	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD		Jumlah Laporan Akuntansi dan Keuangan SKPD	18	18	18	18	18	18	18	18	18		
9	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
10	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Persentase ASN yang Mendapat Pelayanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian		Jumlah ASN yang dilakukan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	13	13	14	14	15	13	13	14	14	
12	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Jumlah peserta Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase administrasi umum yang dilaksanakan secara akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Komponen Instalasi/Penerangan Bangunan Kantor		Jumlah Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28	28	28	30	30	28	28	28	30	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga		Jumlah Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Jumlah Bahan Logistik Kantor yang disediakan	6	6	6	6	6	6	6	6	6	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Jumlah Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan											
	Fasilitasi Kunjungan Tamu		Jumlah waktu Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Jumlah Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	48	48	48	48	48	48	48	48	48	48	
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang tepat sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Pengadaan Mebel		Jumlah Mebel yang diadakan	2	3	3	0	2	2	3	3	0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang diadakan	8	6	4	4	4	8	6	4	4		
	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya		Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang diadakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Jumlah Waktu Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dalam kondisi baik	91%	92%	93%	94%	95%	91%	92%	93%	94%		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan,		Jumlah waktu Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan		Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan											
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	5	5	4	6	6	5	5	4	6		
	Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Jumlah Rumah Jabatan (Dinas)/Gedung Kantor yang mendapat Pemeliharaan Rutin/Berkala	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		Jumlah Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan		
	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan		Tingkat Partisipasi Masyarakat yang menghadiri Musrenbang	12	12	12	12	12	12	12	12	12		

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Pembangunan di Desa													
	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan		Jumlah Sinkronisasi yang dilaksanakan	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	
	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAH DESA		Jumlah Peraturan Perundang-undangan Desa yang dibuat	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	20 Dok.	
	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		Jumlah rekomendasi, koordinasi, dan pengawasan yang dilaksanakan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Penyusunan Perdes dan Perkades	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa		Jumlah fasilitasi pembinaan administrasi tata Pemerintahan desa yang dilakukan	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa		Jumlah Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	1	0	1	10	0	1	0	1	10		
	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	8	10	10	8	8	8	10	10	8		
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		persentase desa dengan Predikat Nilai IKM baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		Jumlah koordinasi yang diselenggarakan di Tingkat Kecamatan	14	14	12	12	12	14	14	12	12		

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi/Sineergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		jumlah koordinasi yang dilaksanakan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan		Jumlah Layanan yang dilaksanakan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan		Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat		Jumlah pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilaksanakan	25	25	30	30	35	25	25	30	30	
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan		Jumlah laporan	25	25	30	30	35	25	25	30	30	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Kewenangan Lain yang Dilimpahkan													
	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		Jumlah fasilitasi dan koordinasi yang dilaksanakan	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	5 Keg.	
	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan		Jumlah Kegiatan yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat		Jumlah koordinasi yang dilaksanakan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	Koordinasi dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah		Jumlah Koordinasi dan Fasilitasi Penegakan perda dan perkada yang dilakukan	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
	PROGRAM PENYELENGGAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		Jumlah Pembinaan kerukunan antar suku, umat beragama, ras dan golongan lainnya yang dilakukan	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	10 Keg.	

NO	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	SPM/standar nasional	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program (outcome), Kegiatan, dan Sub Kegiatan (output)	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis	
				Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025	Th 2026	Th 2022	Th 2023	Th 2024	Th 2025		
				(thn n-2)	(thn n-1)	(thn n)	(thn n+1)	(thn n+2)	(thn n-2)	(thn n-1)	(tnn n)	(thn n+1)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		Jumlah Koordinasi yang diselenggarakan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		Jumlah pembinaan yang dilaksanakan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		Jumlah Koordinasi yang dilaksanakan	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan pada tataran kebijakan Pemerintah Kecamatan Udanawu dapat diidentifikasi 4 (Empat) permasalahan utama pelayanan Pemerintah Kecamatan Udanawu sebagai berikut:

1. Kapasitas Aparatur serta SDM yang masih kurang memadai dalam Jumlah dan persyaratan secara kualitas masih menjadi kendala dalam meningkatkan kinerja pelayanan kepada Masyarakat ;
2. Standarisasi penilaian kinerja untuk masing-masing bidang yang belum terukur terhadap akuntabilitas kinerja Kecamatan Udanawu yang dilakukan oleh Kabupaten Blitar;
3. Kurangnya sarana prasana untuk ruang/gedung baik pelayanan dan arsip.
4. Peningkatan Sumber daya aparatur desa yang masih belum maksimal dalam tugas dan fungsinya dalam melaksanakan pendelegasian wewenang yang di berikan kecamatan dalam meningkatkan pembangunan di pedesaan serta kurangnya Partisipasi serta minat masyarakat untuk meningkatkan pembangunan desa

Pada tingkat implementasi program dan kegiatan pada bagian unit kerja di lingkungan Pemerintah Kecamatan Udanawu dapat diidentifikasi permasalahan pelayanan Pemerintah Kecamatan Udanawu, sebagai berikut :

1. Gedung kantor yang tidak nyaman untuk melakukan pekerjaan, karena sudah mengalami kerusakan parah yang diakibatkan bencana alam baik gempa maupun angin putting beliung;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana jaringan internet yang tergantung dari kominfo sehingga pelayanan Belum optimalnya;
3. Keterbatasan SDM terutama yang memiliki latar belakang kemampuan IT diatas rata-rata;
4. Pusat pelayanan dasar masyarakat terlalu Jauh;
5. Kurangnya partisipasi Masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan Publik;
6. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
7. Kurangnya pemahaman ASN dalam memahami Tugas dan Fungsi.

Permasalahan teknis operasional yang dapat diidentifikasi dari pelayanan Kecamatan Udanawu sebagai berikut :

1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran pelaksana, yang mengakibatkan tugas yang dibebankan seringkali *overload*;
2. Masih belum optimalnya pelaporan Kecamatan program dan kegiatan kepada Pemerintah Kabupaten Blitar;
3. Pendelegasian tugas yang seringkali kurang sesuai dengan tugas dan fungsi, yang berakibat pada terhambatnya pelaksanaan program kecamatan;
4. Masih kurangnya pemahaman aparatur terhadap Pengadaan Barang dan Jasa.

Faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan Kecamatan Udanawu sebagai Perangkat Daerah yang memiliki tugas pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Bupati kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah adalah faktor internal dan eksternal Kecamatan Udanawu, masalah internal yang mempengaruhi Pemerintah Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar antara lain;

1. Jumlah dan kapasitas aparat belum seluruhnya memenuhi tuntutan tugas dan belum sesuai dengan beban kerja;
2. Pola pembinaan aparat yang belum terorientasikan pada peningkatan kinerja;
3. Masih lemahnya pemahaman tupoksi para aparat pemerintah mengakibatkan tidak maksimalnya hasil koordinasi.

Adapun akar permasalahan yang di hadapi :

1. Rendahnya jumlah ketersediaan fasilitas Laptop / komputer;
2. Rendahnya Pengetahuan Masyarakat terkait Pengoperasian Tehnologi;
3. Terbatasnya SDM yang memadai;
4. Anggaran dana yang terbatas;
5. Kurangnya Komunikasi struktural Internal maupun Eksternal;
6. Sarana dan prasarana yang masih terbatas khususnya jaringan Internet.

Perkembangan ekonomi makro secara global dan nasional menunjukkan banyak gejala yang menuntut adanya perubahan/penyesuaian kebijakan dan target pembangunan mulai dari skala pusat hingga ke daerah. Pada Tahun 2023 Kecamatan Udanawu mengalami kondisi yang sulit yang ditandai dengan turunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh.

Turunnya ekonomi masyarakat secara menyeluruh disebabkan adanya perang dingin antara amerika dan china. Perang dingin tersebut menyebabkan efek saling embargo, amerika melarang produk amerika dan eropa masuk ke pasar china dan sebaliknya produk dari china dilarang masuk ke pasar amerika dan eropa. Hal ini menyebabkan turunnya nilai ekspor di china. Akibat menurunnya angka ekspor china, maka angka impor china juga ikut menurun, padahal china banyak melakukan impor bahan baku dari indonesia. Hal inilah yang menyebabkan perputaran uang di indonesia melambat. Dampak dari hal tersebut yaitu menurunnya daya beli masyarakat secara menyeluruh.

2.3.1 Dampak terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah

Visi kepala daerah terpilih periode 2021-2026 adalah **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”**.

Target utama visi pembangunan periode 2021-2026 adalah mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan Kabupaten Blitar dengan bernafaskan semangat baldatun, toyyibatun warobbun ghofur. Secara harfiah frasa baldatun, toyyibatun warobbun ghofur berarti: ”Negeri yang baik dengan Rabb yang Maha Pengampun”. Makna “Negeri yang baik (Baldatun Thoyyibatun)” bisa mencakup seluruh kebaikan alamnya, dan “Rabb yang Maha Pengampun (Robbun Ghofur)” bisa mencakup seluruh kebaikan perilaku penduduknya sehingga mendatangkan ampunan dari Allah SWT.

Semangat kemandirian dan kesejahteraan tersebut secara teknis dapat diintervensi melalui masyarakat sebagai objek dan subjek pembangunan dan pemerintah sebagai pelaksana pembangunan. Visi Kabupaten Blitar dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Masyarakat sebagai Objek dan Subjek Pembangunan
 - Mewujudkan kehidupan masyarakat yang beraklaq, beriman dan bertaqwa;

- Meningkatkan derajat kehidupan masyarakat berazaskan kearifan lokal;
- Mengedepankan kepentingan bersama/ kemaslahatan;
- Menjamin akses pelayanan dasar kepada masyarakat untuk menciptakan masyarakat yang terdidik dan sehat.

2. Pemerintah sebagai Pelaksana Pembangunan

Pembangunan dengan :

- Memastikan pembangunan yang adil dan merata;
- Membentuk birokrasi pemerintah profesional, lincah dan berintegritas;
- Memastikan pembangunan berlandaskan amanah masyarakat.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Rumusan misi membantu menjelaskan gambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Selain itu dalam perumusan misi harus memperhatikan faktor-faktor strategis baik eksternal berupa tantangan dan peluang maupun internal yang berupa kekuatan dan kelemahan, sehingga misi yang disusun tidak hanya menerjemahkan visi semata. Tetapi juga sebagai *problem solving* permasalahan dan isu strategis di Kabupaten Blitar tahun 2021-2026. Maka dalam RPJMD ditetapkan misi yang berfungsi sebagai upaya untuk mewujudkan visi yang rumusannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

MISI 1 :“Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya”

MISI 2 :“Meningkatkan Taraf hidup masyarakat Blitar yang memiliki mutu dan nilai kompetensi tinggi, dengan mengoptimalkan potensi generasi muda Kabupaten Blitar.

MISI 3 : “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

MISI 4 : “Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan potensi ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan.”

Sesuai dengan uraian visi dan misi Bupati terpilih diatas serta selaras dengan tugas dan fungsi, Kecamatan Udanawu mendukung pencapaian **Misi Ke-1 “Meningkatkan Kesejahteraan Sosial Masyarakat**

Blitar Berlandaskan Iman dan Takwa dengan Kearifan Lokal Budaya dan Misi ke-3 “Pengoptimalan kinerja pemerintah yang akuntabel, inovatif dan berintegritas.

Sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan Udanawu untuk mewujudkan visi dan misi kepala daerah terpilih, maka Kecamatan Udanawu mempunyai peran yang sangat penting dalam rangka pelaksanaan pelayanan publik sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang bertujuan :

- memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat
- mendekatkan pelayanan kepada masyarakat
- memperpendek proses pelayanan
- mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti dan terjangkau

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Udanawu masih mengalami hambatan diantaranya :

- a) Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran pelaksana, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
- b) Masih belum optimalnya Kecamatan Udanawu dalam memahami program dan kegiatan yang dituangkan dalam DPA Perangkat Daerah;
- c) Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan;
- d) Sarana dan prasarana yang tidak mendukung kelancaran pelayanan (jumlah sarpras yang tersedia terbatas);
- e) Belum adanya ruangan arsip yang memadai.

Berdasarkan hambatan dan tantangan yang dihadapi oleh Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar, maka perlu dilakukan rencana strategis oleh Kecamatan Udanawu, antara lain:

1. Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Pelayanan Publik);
2. Pendayagunaan Sumber Daya Aparatur Daerah;
3. Peningkatan Penataan Organisasi dan Manajemen Publik;
4. Peningkatan pemahaman tentang Pengelolaan Keuangan dan Barang

Rencana strategis yang akan dilakukan kecamatan Udanawu inilah yang merupakan indikator kunci keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan MDGs (*Millenium Developmnet Goals*).

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat :

- a) Rancangan kerangka ekonomi daerah;
- b) Program prioritas pembangunan daerah;
- c) Rencana kerja, pendanaan dan prakiraan maju.

Selanjutnya akan dipakai sebagai dasar penyusunan KUA-PPAS. Rencana Kerja Kecamatan Udanawu berdasarkan RKPD Kabupaten Blitar sifatnya sebagai pendukung dari pelaksanaan Renja PD se-Kabupaten Blitar yang melaksanakan program dan kegiatan berlokasi di wilayah Kecamatan Udanawu.

Berdasarkan Rancangan Tema Pembangunan RKPD Kabupaten Blitar Tahun 2024 yakni: “Pembangunan SDM dan Pengembangan Infrastruktur Perekonomian Berbasis Kawasan.” dari rancangan tema tersebut kemudian dijabarkan menjadi 5 Prioritas. Adapun 5 (Lima) prioritas Pembangunan Daerah, yaitu:

1. Peningkatan Akses Pelayanan Dasar dan Penguatan Ketahanan Sosial;
2. Pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi kreatif;
3. Pemantapan tata kelola pemerintahan, penguatan BUMD, dan peningkatan pendapatan daerah;
4. Peningkatan penyediaan akses sarana prasarana penunjang perekonomian;
5. Meningkatkan realisasi investasi pada sektor produktif dan pengembangan pasar produk unggulan.

Melihat kelima prioritas Pembangunan Daerah tersebut, Kecamatan Udanawu mendukung pencapaian prioritas yang kedua yakni Pengembangan kewirausahaan dan keberdayaan komunitas-komunitas dalam event ekonomi

kreatif dengan mendukung kegiatan Bupati Blitar *One Village One Product* dan pelaksanaan Pameran yang diadakan oleh Kabupaten Blitar. Dimana kegiatan tersebut mendata pengusaha di wilayah Kecamatan Udanawu dalam semua bidang usaha baik itu produk makanan, produk pelayanan, produk kesenian, ataupun lainnya. Semua produk tersebut, difasilitasi, dibina dan dipromosikan kepada masyarakat sehingga dapat membantu meningkatkan perekonomian dan pendapatan daerah.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan masyarakat Kecamatan Udanawu merupakan hasil dari Musrenbang tingkat desa yang merupakan forum musyawarah perencanaan tahunan di tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah di tingkat dusun. Hasil dari musrenbang desa akan diusulkan di tingkat Kecamatan. Tujuan umum pelaksanaan kegiatan musrenbang desa yaitu mendorong partisipasi masyarakat desa dalam menyusun perencanaan pembangunan tahunan di tingkat desa.

Kecamatan sebagai fasilitator dalam Kegiatan musyawarah pembangunan mendukung terlaksananya kegiatan Musrenbang Baik Tingkat Kabupaten maupun Provinsi. Pada tanggal 21 Februari – 4 Maret 2023 Usulan Musrenbang Desa di Input melalui Sistem Informasi Perangkat Daerah (SIPD) dengan rincian: Desa Ringinanom 6 Usulan, Desa Karanggondang 7 Usulan, Desa Sumpersari 4 Usulan, Desa Sukorejo 11 Usulan, Desa Bendorejo 3 Usulan, Desa Bakung 1 Usulan, Desa Besuki 3 Usulan, Desa Tunjung 6 Usulan, Desa Jati 1 Usulan, Desa Temenggungan 2 Usulan, Desa Mangunan 9 Usulan dan Desa Slemanan 9 Usulan jadi Total Keseluruhan usulan dari seluruh Desa adalah 62 (Enam Puluh Dua) Usulan. Dari 62 usulan tersebut divalidasi oleh Mitra Bappeda yang selanjutnya akan diteruskan ke Musrenbang Kecamatan, dari 62 Usulan hanya 60 Usulan yang bisa dimasukkan dalam Musrenbang Kecamatan, karena 2 (Dua) Usulan dari Desa Jati dan Desa Mangunan tidak termasuk dalam prioritas pembangunan daerah.

Dari 60 usulan dalam musrenbang kecamatan ada 14 (Empat Belas) Usulan yang diterima dan 43 (Empat Puluh Tiga) usulan yang belum disepakati karena melampaui batas usulan Pemerintah Kabupaten Blitar. Adapun 14 (Empat Belas) usulan yang diterima sesuai dengan prioritas

Pembangunan Daerah Kecamatan Udanawu pada tahun 2023 sebagai berikut:

Prioritas 1 : PENINGKATAN AKSES PELAYANAN DASAR DAN PenguATAN KETAHANAN SOSIAL				
No.	Usulan	Desa Pengusul	SKPD Tujuan	Keterangan
1	Perlunya Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Mangunan	Dinas Pendidikan	
2	Bantuan Kepada Badan / Lembaga / Organisasi / Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan (Fogging)	Karanggondang	Dinas Kesehatan	
3	Bantuan Kepada Badan / Lembaga / Organisasi / Kelompok Masyarakat Bidang Kesehatan (Tingginya Angka Stunting)	Sukorejo	Dinas Kesehatan	
4	pemdes belum memiliki perpustakaan desa untuk mendukung minat baca dan pengetahuan masyarakat (Perpustakaan Desa)	Tunjung	Dinas Perpustakaan dan Arsip	
Prioritas 2: PENGEMBANGAN KEWIRUSAHAAN DAN KEBERDAYAAN KOMUNITAS-KOMUNITAS DALAM EVENT EKONOMI KREATIF				
No.	Usulan	Desa Pengusul	SKPD Tujuan	Keterangan
1	Perlunya Pelatihan dan Fasilitasi Produksi Olahan Makanan, Minuman dan Kerajinan UKM yang telah memiliki rintisan usaha	Sumbersari	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
2	Perlunya Workshop dan Pelatihan Digitalisasi/ TIK bagi ASN dan masyarakat penggerak ekonomi kreatif	Slemanan	Dinas Komunikasi dan Informatika	
3	Perlunya Pelatihan dan Fasilitasi Produksi Olahan Makanan, Minuman dan Kerajinan UKM yang telah memiliki rintisan usaha	Karanggondang	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	
4	Perlunya peningkatan industri pariwisata yang difasilitasi standarisasinya	Sukorejo	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga	
Prioritas 3 : PEMANTAPAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN, PenguATAN BUMD DAN PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH				
No.	Usulan	Desa Pengusul	SKPD Tujuan	Keterangan
1	N I H I L			
2				
3				

4		
5		

Prioritas 4 : PENINGKATAN PENYEDIAAN AKSES SARANA PRASARANA PENUNJANG PEREKONOMIAN

No.	Usulan	Desa Pengusul	SKPD Tujuan	Keterangan
1	Belum terpeliharanya secara berkala Jalan di Kabupaten	Karanggondang	PUPR	
2	Perlunya Penyediaan Perlengkapan Jalan	Sumbersari	Dinas Perhubungan	
3	Perlunya Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Besuki	Dinas Pertanian dan Pangan	
4	Perlunya rehabilitasi aksesibilitas jalan penopang aktivitas perekonomian	Sukorejo	PUPR	
5	Perlunya Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT)	Ringinanom	Dinas Pertanian dan Pangan	

Prioritas 5 : MENINGKATKAN REALISASI INVESTASI PADA SEKTOR PRODUKTIF DAN PENGEMBANGAN PASAR PRODUK UNGGULAN

No.	Usulan	Desa Pengusul	SKPD Tujuan	Keterangan
1	Bantuan Kepada Badan / Lembaga / Organisasi / Kelompok Masyarakat Bidang Perindustrian	Slemanan	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	

PENA INTAN

No.	Usulan	Desa Pengusul	SKPD Tujuan	Keterangan
1	Dam ambrol	Bakung	Dinas Pertanian dan Pangan	
2	Sampah	Bendorejo	Dinas Lingkungan Hidup	
3	Perlunya Rehabilitasi Perlengkapan Jalan	Tunjung	Dinas Perhubungan	
4	Ternak Sapi	Mangunan	Dinas Peternakan dan Perikanan	
5	Jamban	Temenggungan	Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman	

Usulan diatas menjadi bahan Musrenbang secara pada tanggal 30 Maret 2023 yang sebelumnya telah dilakukan Desk Musrenbang dengan

Dinas/Badan terkait. Dalam menjalankan tugasnya, Kecamatan Udanawu mempunyai kegiatan yang tertampung pada Program, Kegiatan dan sesuai dengan Tabel 2.5.1 sebagai berikut:

Tabel. 2.5.1
Usulan Program dan kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun
2024
Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar

No	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target Indikator	Keterangan
1	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan	5 Kegiatan	
a	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Laporan Koordinasi yang dilaksanakan	24 Kali	
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12 Kelompok	Kegiatan Para Musrenbang, dan Musrenbang

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional Dengan Tugas Pokok Dan Fungsi PD

Tujuan kebijakan nasional pemerintah Republik Indonesia adalah reformasi birokrasi, ada 4 tujuan reformasi birokrasi dengan 8 area perubahan antara lain :

1. Pemerintah yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dengan area perubahan :
 - Manajemen perubahan (*mind set dan culture set*)
 - Penguatan pengawasan
 - Penguatan akuntabilitas kinerja
2. Efektivitas dan efisiensi kegiatan pemerintahan, dengan area perubahan :
 - Penataan dan penguatan organisasi
 - Penataan sumber daya manusia (SDM)
3. Peningkatan kualitas pengambilan kebijakan, dengan area perubahan :
 - Penataan peraturan penundang-undangan
 - Penataan tatalaksana
4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, dengan area perubahan :
 - Peningkatan kualitas pelayanan publik

Kualitas penyelenggaraan pelayanan umum (*publik*) di daerah masih perlu ditingkatkan ke arah yang lebih baik. Banyak hal yang menyebabkan belum optimalnya penyelenggaraan pelayanan tersebut, misalnya keterbatasan sarana pelayanan, perilaku petugas yang belum bersifat melayani, tidak jelasnya waktu, dan biaya yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan publik serta panjangnya prosedur yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu jenis pelayanan publik.

Oleh karenanya daerah diharapkan terus memiliki prakarsa dalam melakukan perbaikan pelayanan. Prakarsa daerah dalam meningkatkan pelayanan publik tentunya harus sesuai kebutuhan dan sesuai dengan kepuasan masyarakat. Masyarakat berhak memberikan masukan, koreksi dan perbaikan terhadap pelayanan. Inilah yang disebut manajemen publik masa kini (*new publik management*) yang memiliki ciri bahwa kewenangan berada pada petugas pelayanan dan pelanggan, menekankan pada pelayanan yang **“menyentuh hati”** dan perombakan visi dan misi pelayanan. Yang

berarti masyarakat dianggap sebagai pemilik saham (*shareholder*) sehingga pelayanan lebih menekankan pada kualitas sebagai hasil negosiasi kepentingan masyarakat dan pemerintah. Dengan kata lain posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik berubah dari **“dilayani”** menjadi **“melayani”**.

Posisi kecamatan menjadi sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se-Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2010 – 2014 dilaksanakan dengan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan tatanan pengelolaan manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip – prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajemen penyelenggara pemerintahan dan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya. Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara akuntabel yang akan berakibat langsung

padamenurunnya kualitas pelayanan publik serta menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja PD

Tujuan

Tujuan Renja PD merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi organisasi yang menggambarkan arah strategi organisasi dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi. Berdasarkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tujuan pada Tahun 2024 adalah:

1. Meningkatkan Kualitas dan Mendekatkan Pelayanan Publik Hingga Ke Desa;
2. Meningkatkan Efisiensi dan Efektifitas serta Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah di Wilayah Kecamatan;
3. Terwujudnya Penghayatan Dan Penerapan Nilai-nilai Religius, Toleransi, Solidaritas Sosial, dan Gotong-royong Dalam Kehidupan Masyarakat di Kecamatan.

Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi yang akan dicapai dalam jangka waktu tahunan dan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga harus bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai. Adapun sasaran yang ingin dicapai oleh Kecamatan Udanawu dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi adalah:

1. Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah;
3. Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat desa;
4. Meningkatnya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum Serta Pemerintahan Umum.

Tabel 3.2.1

**Kantor Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar Tahun 2024 memiliki
Perencanaan Kinerja sebagai berikut :**

KECAMATAN UDANAWU					
No	Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pencapaian Target (%)	
				Semester I	Semester II
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya kualitas dan mendekatkan pelayanan publik hingga ke desa	100%	7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	50	100
			7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	50	100
			7.01.02.2.01.01 Koordinasi/ Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	50	100
			7.01.02.2.02 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di Kecamatan	100	100
			7.01.02.2.02.02 Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	100	100
2	Meningkatnya Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa serta Pemberdayaan Masyarakat Desa	33,33 %	7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	50	100
			7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	50	100
			7.01.03.2.01.01 Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	100	-
			7.01.03.2.01.02 Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan	50	100
		100%	7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	50	100

KECAMATAN UDANAWU					
No	Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pencapaian Target (%)	
				Semester I	Semester II
1	2	3	4	5	6
			7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	50	100
			7.01.06.2.01.01 Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	50	100
			7.01.06.2.01.02 Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	50	100
			7.01.06.2.01.16 Fasilitasi penyusunan program dan pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	50	100
			7.01.06.2.01.17 Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	50	100
3	Meningkatnya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemerintahan umum	75%	7.01.04 PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	50	100
			7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	30	100
			7.01.04.2.01.01 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	0	100
			7.01.04.2.01.02 Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	30	100
			7.01.04.2.02 Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	100	100
			7.01.04.2.02.01 Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	100	100
		100%	7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	50	100
			7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	50	100

KECAMATAN UDANAWU

No	Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pencapaian Target (%)	
				Semester I	Semester II
1	2	3	4	5	6
			7.01.05.2.01.03 Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	50	100
			7.01.05.2.01.04 Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	60	100
			7.01.05.2.01.08 Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	60	100
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	BB	X.XX.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	50	100
			X.XX.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	50	100
			X.XX.01.2.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	20	100
			X.XX.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	80	100
			X.XX.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	50	100
			X.XX.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	50	100
			X.XX.01.2.02.03 Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian /Verifikasi Keuangan SKPD	50	100
			X.XX.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	50	100
			X.XX.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	0
			X.XX.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50	100
			X.XX.01.2.05.03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	100	0
			X.XX.01.2.05.11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	30	100
			X.XX.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	50	100
			X.XX.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	50	100

KECAMATAN UDANAWU

No	Sasaran	Target	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Pencapaian Target (%)	
				Semester I	Semester II
1	2	3	4	5	6
			X.XX.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	50	100
			X.XX.01.2.06.03 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	50	100
			X.XX.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor	50	100
			X.XX.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50	100
			X.XX.01.2.06.08 Fasilitas Kunjungan Tamu	50	100
			X.XX.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	100
			X.XX.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	100
			X.XX.01.2.07.05 Pengadaan Mebel	100	0
			X.XX.01.2.07.06 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	100	0
			X.XX.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	100
			X.XX.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat	50	100
			X.XX.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	50	100
			X.XX.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	50	100
			X.XX.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50	100
			X.XX.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	60	100
			X.XX.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	50	100
			X.XX.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	100	0

3.3 Program Dan Kegiatan

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi PD Kecamatan Udanawu maka dapat disimpulkan bahwa fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama Kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat kecamatan udanawu. Pendekatan Pelayanan kepada masyarakat merupakan salah satu cara yang ditempuh untuk mendorong pemerintah daerah khususnya kecamatan Udanawu melakukan pelayanan publik yang tepat bagi masyarakat dan sekaligus mendorong masyarakat untuk melakukan kontrol terhadap kinerja pemerintah di bidang pelayanan publik sehubungan dengan hal tersebut diatas yang merupakan bahan pertimbangan di dalam menyusun/merumuskan program dan kegiatan PD Kecamatan Udanawu pada tahun 2024 yang merupakan salah satu bentuk dukungan nyata terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah yaitu **“Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri Dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia, Baldatun, Toyyibatun, Warobbun Ghofur”**. Di Tahun 2024 pada Kecamatan Udanawu Kabupaten Blitar terdapat 6 (enam) Program, 15 (Empat belas) Kegiatan dan 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan.

Dalam rangka pelaksanaannya maka program, kegiatan dan Subkegiatan pendanaan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

dengan 7 (Tujuh) kegiatan dan 23 (Dua Puluh Tiga) Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah,
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah;
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
- b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan PD;
 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD;
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD.
- c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian;

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan.
- d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik dan Penerangan Bangunan Kantor;
 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - Penyediaan peralatan rumah tangga;
 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - Fasilitasi Kunjungan Tamu;
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
- e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pengadaan Mebel;
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
- f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Surat Menyurat;
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin lainnya
 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan lainnya.

2 Program Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik

Pada program ini terdapat 2 (Dua) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
- Koordinasi/sinergi perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan di tingkat Kecamatan
- b. Penyelenggaraan urusan pemerintah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan
- Fasilitasi Percepatan Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan;

3. Program Pemerdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan

Pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan dan 2 (Dua) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa;
 - Sinkronisasi Program kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang dilakukan oleh Pemerintah dan swasta di wilayah kerja Kecamatan
- b. Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga tingkat kecamatan dan kelurahan
 - Pembentukan dan penumbuhan karakter keluarga melalui peningkatan kesadaran masyarakat akan pentingnya penghayatan dan pengamalan Pancasila dalam semua aspek kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara

4. Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa

Pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan dan 4 (Empat) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa;
 - Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa;
 - Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya.

5. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Pada program ini terdapat 2 (Dua) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan sebagai berikut:

- a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan;
 - Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat.
- b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
 - Koordinasi/sinergi dengan Perangkat Daerah yang tugas dan fungsinya di

Bidang Pengakan Peraturan perundang-undangan dan/atau Kepolisian
negara Republik Indonesia

6. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Pada program ini terdapat 1 (Satu) kegiatan dan 3 (Tiga) sub kegiatan sebagai berikut :

- a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah
 - Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa;
 - Pembinaan Kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras dan golongan lainnya guna mewujudkan stabilitas keamanan regional dan nasional;
 - Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan.

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Jumlah Rencana Kerja seluruh program di tahun 2024 di Kecamatan Udanawu sebanyak 6 (Enam) program dengan jumlah kegiatan sebanyak 15 (Lima Belas) kegiatan serta 36 (Tiga Puluh Enam) Sub Kegiatan yang tersebar di satu lokasi yaitu Kecamatan Udanawu dengan total kebutuhan anggaran sebesar Rp 2.019.146.500,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD II. Rumusan rencana program dan kegiatan PD tahun 2024 dan perkiraan maju tahun 2024 Tabel 4.1.1. sebagai berikut

**RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)
KECAMATAN UDANAWU KAB. BLITAR
TAHUN 2024**

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		KECAMATAN UDANAWU						2.019.146.500,00							2.686.014.500,00	
7		UNSUR KEWILAYAHAN						2.019.146.500,00							2.686.014.500,00	
	7.01	KECAMATAN						2.019.146.500,00							2.686.014.500,00	
1.	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATENKOTA	-	100 %			-	1.891.865.424,00						100 %	2.074.731.700,00	
	7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-			-	7.958.328,00			-	-	-	-	6.400.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>				9 Dokumen	4.582.560,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.100.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			<i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>				3 Laporan	3.375.768,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-	-			-	1.225.064.492,00			-	-	-	-	1.766.190.044,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			<i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>				14 Orang/bulan	1.185.434.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.692.240.044,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>				85 Dokumen	38.235.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		72.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.02.0004	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD														
			<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD</i>				18 Dokumen	903.540,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		1.300.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			<i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i>				1 Laporan	491.952,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		650.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-			-	104.719.280,00			-	-	-	-	13.500.000,00	KECAMATAN UDANAWU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7.01.01.2.05.0003	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian					14 Dokumen	719.280,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		500.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					1 Orang	104.000.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		13.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	125.725.463,00			-	-	-		76.500.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					5 Paket	6.202.014,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		3.600.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					28 Paket	36.866.198,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		38.750.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					10 Paket	5.637.468,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.450.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					6 Paket	6.755.127,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		4.200.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					12500 Paket	6.226.656,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		7.500.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					48 Laporan	64.038.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		18.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	115.508.598,00			-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				3 Unit	62.544.726,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		0,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				4 Unit	52.963.872,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		65.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	142.150.627,00			-	-	-	-	85.141.656,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				12 Laporan	1.387.500,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		2.200.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	9.114.207,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		8.941.656,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	131.648.920,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		74.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-			-	170.738.636,00			-	-	-	-	62.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				12 Unit	78.847.906,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		37.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				4 Unit	6.040.000,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		5.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	85.850.730,00	Kab. Blitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		20.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2.	7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	-	100 %			-	20.059.432,00						100 %	66.828.800,00	
	7.01.02.2.01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	-	-			-	16.200.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.02.2.01.0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i>				14 Laporan	16.200.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.02.2.02	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	-	-			-	3.859.432,00			-	-	-	-	16.828.800,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.02.2.02.0002	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan</i>				14 Laporan	3.859.432,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		16.828.800,00	KECAMATAN UDANAWU
3.	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	-	5 Kegiatan			-	29.222.480,00						5 Kegiatan	215.573.200,00	
	7.01.03.2.01	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	-	-			-	22.222.480,00			-	-	-	-	165.573.200,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa														
			<i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpatisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa</i>				12 Lembaga Kemasyarak atan	7.449.432,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		60.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.01.0002	Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan														
			<i>Jumlah Dokumen Sinkronisasi Program Kerja dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat yang Dilakukan oleh Pemerintah dan Swasta di Wilayah Kerja Kecamatan</i>				42 Dokumen	14.773.048,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		105.573.200,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.06	Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan	-	-			-	7.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i>				220 Keluarga	7.000.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
4.	7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	-	5 Kegiatan			-	6.727.349,00						5 Kegiatan	189.354.800,00	
	7.01.04.2.01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	-	-			-	4.327.349,00			-	-	-	-	164.354.800,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan														
			<i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i>				3 Laporan	3.277.349,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		125.354.800,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat														
			<i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat</i>				8 Laporan	1.050.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		39.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.02	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	-	-			-	2.400.000,00			-	-	-	-	25.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia														
			<i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia</i>				4 Laporan	2.400.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		25.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
5.	7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	-	10 Kegiatan			-	45.750.267,00						10 Kegiatan	73.000.000,00	
	7.01.05.2.01	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	-	-			-	45.750.267,00			-	-	-	-	73.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				8 Orang	43.500.267,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		50.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan														
			Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				8 Dokumen	2.250.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		23.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
6.	7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	-	20 Dokumen			-	25.521.548,00						20 Dokumen	66.526.000,00	
	7.01.06.2.01	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	-	-			-	25.521.548,00						-	66.526.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0001	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa				12 Dokumen	14.689.604,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		29.526.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa														
			Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa				12 Dokumen	3.389.144,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		10.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0016	Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa														
			Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa				1 Dokumen	1.600.000,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		12.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
	7.01.06.2.01.0017	Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya				10 Laporan	5.842.800,00	Kab. Bitar, Udanawu, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	-		15.000.000,00	KECAMATAN UDANAWU
			J U M L A H						2.019.146.500,00						2.686.014.500,00	

RENCANA KERJA KECAMATAN UDANAWU TAHUN 2024

BAB V

PENUTUP

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan diterbitkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Udanawu maka dapat disimpulkan bahwa Fungsi utama pemerintah daerah khususnya Kecamatan Udanawu adalah penyediaan pelayanan publik bagi masyarakat, oleh karena itu optimalisasi pelayanan publik yang efisien dan efektif menjadi perhatian utama kecamatan Udanawu agar dapat menyajikan pelayanan publik yang prima bagi masyarakat.

Didasarkan pada isu-isu strategis yang berkembang di Kecamatan Udanawu antara lain :

1. Reformasi birokrasi pemerintah daerah
2. Pendayagunaan sumber daya aparatur daerah
3. Peningkatan Pelayanan Publik hingga ke desa
4. Belum tersedia Ruang arsip Vital
5. Pengelolaan keuangan dan barang yang belum tertib

Tetapi di dalam proses pelaksanaannya Kecamatan Udanawu masih mengalami hambatan-hambatan diantaranya :

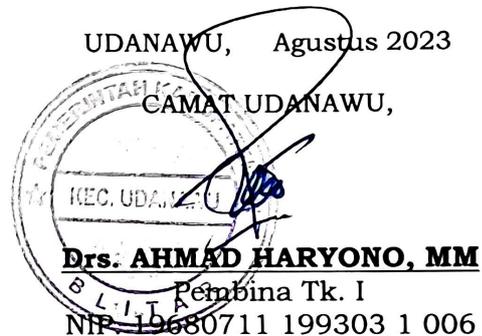
1. Kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) Kecamatan terutama pada jajaran staf, sehingga tugas dibebankan seringkali *overload*;
2. Perencanaan yang sudah di tetapkan Masih bisa berubah tergantung dari situasi kebutuhan yang ada;
3. Belum dioptimalkannya pemanfaatan teknologi informasi dalam membantu kelancaran pelaksana tugas dan pelayanan;
4. Sering adanya pergantian/mutasi pegawai yang menduduki pekerjaan yang vital seperti bendahara pengeluaran, barang dan gaji;
5. Penataan administrasi khususnya arsip dokumen yang kurang baik.

Berdasarkan isu-isu strategis dan hambatan yang dialami Kecamatan Udanawu, maka diperlukan Rencana Tindak Lanjut yang harus dilakukan oleh Kecamatan Udanawu untuk mencapai hasil yang diinginkan antara lain:

1. Mengusulkan tambahan staf kepada BKPSDM Kabupaten Blitar, walaupun pada kenyataannya sulit untuk dipenuhi;
2. Meningkatkan Sistem Perencanaan yang terintegrasi dengan baik yang dituangkan dalam DPA PD dengan cara mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) terkait untuk menyiapkan Bimtek penyusunan program dan kegiatan kepada semua PPTK;
3. Mengusulkan kepada Pengguna Anggaran (PA) dan Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) untuk dapatnya mengubah manajemen publik konvensional dengan menggunakan manajemen publik yang berbasis IT;
4. Mengusulkan kepada pimpinan khususnya perbaikan pada penataan arsip dokumen vital.

UDANAWU, Agustus 2023

CAMAT UDANAWU,



Drs. AHMAD HARYONO, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19680711 199303 1 006